

Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Serang Oleh

Reva Arta Sari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail : revaartasari12@gmail.com

ABSTRAK

Dari latar belakang masalah, peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Serang. Belum optimalnya dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan karna masih banyak nya aktivitas anak jalanan khususnya di Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teori Van Horn and Van Metter bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh implemetasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi pemenuhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia sikap atau kecenderungan implementor mencakup respon, pemahaman, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, komunikasi anatarorganisasi terkait dalam artian koordinasi; serta kondisi lingkungan ekonomi, soisal dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, obervasi atau pengamatan dan studi dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Serang, SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Serang, PSA (Pekerja Sosial Anak) Kota Serang, KPJ (Komunitas Penyanyi Jalanan) Kota Serang, Anak Jalanan dan Keluarga Anak Jalanan. Mengguji validitas peneliti menggunakan triangulasi sumber dan Teknik. Dapat dikatakan hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Serang belum berjalan optimal.

Kata Kunci: Anak jalanan, Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Serang.

ABSTRACT

From the background of the problem, the researcher focused this research on how to implement the Street Children Development Program Policy in Serang City. The implementation of the street children development program is not yet optimal because there are still many street children's activities, especially in Serang City. The aim of this research is to find out how the Street Children Development Program Policy is implemented in Serang City. This research uses Van Horn and Van Metter's theory that the success of implementation is influenced by the implementation of a policy which is influenced by the characteristics of the implementing agent which includes bureaucratic structure, norms, and relationship patterns that occur in the bureaucracy in fulfilling resources, both human and human resources. non-human attitudes or tendencies of implementors include responses, understandings and value preferences held by implementors, communication between related organizations in the sense of coordination; as well as economic, social and political environmental conditions. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques use interviews, observations and documentation studies. The informants for this research were the Serang City Social Service, Serang City SATPOL PP (Prajapati Police Unit), Serang City PSA (Child Social Workers), Serang City KPJ (Street Singers Community), Street Children and Street Children's Families. Testing the validity of researchers using triangulation of sources and techniques. It can be said that the research results in the Implementation of the Street Children Development Program Policy in Serang City have not run optimally.

Keywords: Street children, Implementation of the Street Children Development Program Policy in Serang City.

PENDAHULUAN

Anak jalanan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kota Serang. Anak jalanan merupakan anak-anak yang rentan, tergantung, berkembang serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja di jalanan, pusat keramaian seperti halnya pasar, pinggir jalan, lampu merah dan

lainnya. Baik sebagai pedagang ataupun pemulung, pengemis, pengamen, manusia silver, dan berkeliaran tidak menentu. Kehidupan anak jalanan tersebut sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit dan tindak kekerasan baik anggota kelompoknya atau orang lain. Anak-anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk

atau negative hanya untuk memperoleh sesuap nasi agar bertahan hidup. Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau bahkan berkeliaran dipinggir jalan maupun ditempat-tempat umum.

Didalam Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup dijalan dan tempat-tempat umum, seperti jalanan umum, terminal, pasar, stasiun atau taman kota. Dengan adanya kebutuhan tersebut menuntut seseorang melakukan pekerjaan dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Kota menjadi tujuan utama untuk mencari penghidupan layak, tanpa disadari terdapat kenyataan bahwa hidup dikota tidaklah semudah yang dipikirkan. Palsunya terdapat berbagai permasalahan yang lazim terjadi dikota, seperti halnya di Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten dimana masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kesejahteraan dan masih berada dalam bayang-bayang kemiskinan. Banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan di kota serang sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam hal ini, bukan hanya orangtua yang mencari kerja, anak pun ikut serta berkerja seperti halnya menjadi anak jalanan. Di Kota Serang sering dijumpai anak jalanan yang berkerja faktor bahkan jumlahnya meningkat.

Permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kota Serang khususnya data anak jalanan pada tahun 2019 jumlah anak jalanan terdapat 142 jiwa diantaranya 116 laki dan 26 perempuan, pada tahun 2020 pada bulan bakti sosial mengalami penurunan menjadi 85 jiwa diantaranya 41 laki-laki dan 44 perempuan, berdasarkan rekapitulasi data PMKS PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kota Serang khususnya anak jalanan pada tahun 2020 mengalami peningkatan anak jalanan menjadi 153 jiwa diantaranya 122 laki-laki dan

31 perempuan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 142 jiwa di antaranya 116 laki-laki dan 26 perempuan.

Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, pemerintah Kota Serang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Didalam perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 pasal 1 alinea 14 menyebutkan penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan agama dan adat serta tata krama kesopanan dalam masyarakat. Dengan semakin berkembangnya bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Serang. Selain dari pada itu masih banyak terlihat anak jalanan yang berusia sekolah dan anak jalanan ini terlihat pada oprasional anak jalanan terlihat ramai pada saat pagi, sore dan malam dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam hari titik kumpul anak jalanan diperempatan lampu merah dan jalan-jalan protokol di Kota Serang. Hal ini dapat merusak kehidupan sosial ekonomi, bahkan telah menurunkan mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda rasa

aman, nyaman, dan tentram perlu diwujudkan di Kota Serang oleh karena itu perbuatan penyakit masyarakat yang ada di Kota Serang diperlukannya aturan tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelarangan serta penindakan terhadap penyakit masyarakat agar terhindar gangguan/dampak negative yang akan timbul didalam masyarakat.

KAJIAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Dalam teori Van Metter dan Van Horn proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dalam suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut Van Metter dan Van Horn ada beberapa yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

1. Standar & Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana
4. Karakteristik Organisasi Pelaksana
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
6. Sikap Para Pelaksana

2. Program Pembinaan Anak Jalanan

Pembinaan adalah menekankan pada pengembangan manusia dari segi praktis, yaitu pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Mangunhardjana mengatakan bahwa dalam pembinaan, orang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu yang diperktikan tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap dan

kecakapan. Pembina dapat diartikan proses belajar untuk melepaskan hal-hal yang dianggap sudah tidak berguna dan menggantinya dengan mempelajari pengetahuan dan praktek baru. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, merubah dan mengembangkan sikap, memberikan latihan, mengembangkan kecakapan dan keterampilan. Pembinaan akan berjalan dengan baik apabila seseorang telah mengikuti pembinaan yang memiliki kemampuan untuk melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya, Menganalisis situasi kehidupan dan kerjanya dari segi positif atau negative, Menemukan masalah-masalah dalam kehidupan serta berusaha mengatasinya, Menemukan hal-hal yang sebaiknya diubah atau diperbaiki dan Merenungkan sasaran yang ingin dicapai dalam hidup setelah mengikuti pembinaan.

3. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Adapun penyebab lainnya anak turun ke jalanan secara umum dapat digambarkan secara umum dapat digambarkan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendidikan yang relatif rendah

Pendidikan merupakan hal yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Mendapat Pendidikan yang layak dan bermutu adalah hak setiap warna negara yang dijamin dalam UUD 1945. Fenomena Pendidikan anak jalanan di Kota Serang kebanyakan memiliki Pendidikan rendah dan ada yang tidak sekolah serta putus sekolah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor anak jalanan sulit bersaing dan masuk ke dunia kerja. Ada pun hasil wawancara dengan anak jalanan menjadi manusia silver di Lampu Merah Bayangkara Kota Serang Bernama Muhammad Rizky berusia 12 Tahun dia berhenti

sekolah dari kelas 3 SD dia melakukan menjadi manusia silver sudah 2 tahun dan orangtua nya pun berkerja sebagai pengamen di Rs Pemda. Hal ini dapat dikatakan bahwa memang penyebab anak jalanan turun kejalanan karna rendahnya Pendidikan dan desakan ekonomi.

2. Faktor Kemiskinan

Faktor kemiskinan yang melanda keluarga mereka menyebabkan anak turun kejalan dan berkeliaran menjadi anak jalanan, mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memintaminta dan mengamen dijalanan. Anak jalanan tersebut mengharap belas kasihan para pengendara yang melintas di setiap lampu merah. Lalu mereka dibiarkan oleh orangtua nya untuk melakukan aktivitas di jalanan sebagai tambahan untuk mencari nafkah. Kondisi demikian disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dari orangtua anak jalanan.

Selain terdapat faktor penyebab, juga terdapat beberapa resiko yang dihadapi anak jalanan dengan kehidupannya di jalanan, diantaranya: rawan mendapatkan pelecehan, berpotensi tidak melanjutkan Pendidikan, rawan kesehatan dikarnakan banyak menghirup polusi udara, berpotensi menjadi mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, berpotensi melakukan tindak kekerasan dan kriminal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan didasarkan atas hasil kunjungan lapangan di wilayah dimana penelitian dilakukan yaitu di Kota Serang informan yang dipilih berdasarkan pada karakteristik kesesuaian data yang diperlukan yakni : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Serang, Kepala Bidang PPHD & Ketentraman Ketertiban Umum SATPOL PP Kota Serang, PSA (Pekerja Sosial Anak) Kota Serang, KPJ (Komunitas Penyanyi Jalanan) Kota Serang, Anak Jalanan dan Keluarga Jalanan. Informan tersebut, diperoleh tidak berdasarkan jumlah yang dibutuhkan melainkan berdasarkan

pertimbangan fungsi dan peran sesuai fokus masalah penelitian. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kota Serang, peneliti menggunakan teori Van Metter & Van Horn, ada 6 elemen yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implemetasi kebijakan dalam tingkat keberhasilannya dapat diukur jika standar dan sasaran kebijakan realistis sosial kultur yang berada dilevel pada pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Ketika standar dan sasaran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga bisa dikatakan efektif atau berhasil. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan program Pembinaan Anak Jalanan lahir karena meningkatnya jumlah anak jalanan di Provinsi Banten terutama di Kota Serang yang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten. Khususnya untuk anak jalanan yang berusia 6-18 tahun yang mengganggu aktivitas pengguna jalan, tempat umum, pasar dan keindahan Kota Serang. Pemerintah Dinas Sosial Kota Serang berupaya mengatasi masalah anak jalanan yang sudah menjadi masalah di Kota Serang dengan membuat kebijakan program Pembinaan Anak Jalanan yang diharapkan dapat mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Serang. Dalam permasalahan standar dan sasaran kebijakan program Pembinaan Anak Jalanan, pada dasarnya belum cukup realistis di terapkan di Kota Serang karna sampai saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Kemudian ukuran keberhasilan dari program ini adalah pemerintah dapat mengurangi jumlah

anak jalanan yang terdapat di Kota Serang dan pemerintah dapat memberikan wadah atau tempat untuk anak jalanan menyalurkan bakat keterampilan dan keahliannya.

2. Sumber Daya

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang sangat terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan, karna dalam melaksanakan suatu kebijakan supaya berjalan dengan apa yang diharapkan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan yang memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Selain dari sumber daya manusia, Adapun sumber-sumber daya lain yang perlu diperhatikan dalam tahap implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Berdasarkan temuan di lapangan sumber daya manusia terdapat kekurangan personil PSA (Pekerja Sosial Anak) Kota Serang yakni yang masih aktif 2 orang yang membantu Dinas Sosial Kota Serang dalam penanganan anak jalanan di Kota Serang sehingga tidak optimal dalam penanganan anak jalanan. Adapun yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam merajia PMKS termasuk anak jalanan di Kota Serang dalam bulan bakti sosial yang dilakukan satu tahun sekali berkerja sama dengan satpol pp dan polisi setempat untuk melakukan rajia besar-besaran.

Sumber daya anggaran dalam suatu kebijakan sangat berperan penting dalam pelaksanaan dan keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya anggaran yang memadai dan tercukupi untuk melaksanakan suatu kebijakan maka besar sekali harapan suatu kebijakan berjalan dengan efektif. Berdasarkan penemuan hasil di lapangan terdapat kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Serang masih terbentur dengan masalah anggaran sehingga untuk anggaran pada tahun 2022 pun menggunakan uang

pribadi, dan khususnya untuk anggaran gaji para pelaksana kurangnya sumber daya finansial dalam program Pembinaan Anak Jalanan ini menjadi penyebab faktor yang menyebabkan program ini belum berjalan efektif.

Sumber daya sarana dan prasana Dalam pelaksanaan suatu kebijakan jika hasil pelaksanaannya sesuai dengan yang diinginkan maka pembuat kebijakan dan dinas-dinas terkait harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dan memandai dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan penemuan di lapangan Dinas Sosial sudah menyediakan fasilitas berupa Rumah Singgah namun yang masih menyewa berada di Sempu Cipayung Kota Serang. Selain itu Rumah Singgah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi untuk anak jalanan dan para petugas pelaksana untuk melaksanakan tugasnya untuk mengamati, mengumpulkan dan mengasesemen anak jalan dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Serang. Namun sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial ini belum menjadi rumah singgah tetap dikarnakan tidak adanya panti khusus pembinaan atau penanganan yang berkelanjutan untuk anak jalanan dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Serang.

Sumber daya waktu Sumber daya waktu merupakan sumber daya yang sama pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, dengan adanya sumber daya waktu, pemerintah daerah bisa mengetahui kapan kebijakan itu harus dilakukan dan kapan kebijakan itu harus selesai. Untuk jam oprasional para petugas di lapangan dari jam 09.00-17.00 bahkan pernah oprasional jam 12.00-20.00 tergantung Dinas Sosial yang diperintahkan karna memang aktivitas anak jalanan tidak bisa ditentukan kapan mereka mulai aktivitasnya dan kapan mereka ada di jalan. Meskipun hanya melakukan pendataan, pendekatan dan mengasesemen di lapangan karena program ini tidak dapat dipastikan waktu dalam aktivitasnya sehingga dibutuhkan waktu

lebih lama lagi untuk memaksimalkan kebijakan program ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan waktu yang diberikan untuk melaksanakan Program Pembina Anak Jalanan ini sudah cukup.

3. Komunikasi Antara Badan Pelaksana Program Pembinaan Anak Jalanan

Komunikasi memiliki peran penting dan fungsi penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya, pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat komunikasi yang lancar. Dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan ini kita berkoordinasinya ke dinas biasanya. Kadang juga dinas yang turun langsung ke lapangan dengan PSA bahkan dengan SATPOL PP kalo rajia besar-besaran atau bakti sosial yang dilaksanakan satu tahun 1x, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara keseluruhan oleh petugas lapangan dan pembuat kebijakan berjalan dengan lancar dan baik. Dinas Sosial Kota Serang pun mengkoordinasi dengan SATPOL PP dengan mengatasi anak jalanan di Kota Serang dengan cara sosialisasi anak jalanan dibina oleh Dinas Sosial Kota Serang, koordinasi dan aksi penertiban. Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Serang sehingga dapat dikatakan komunikasi antar badan pelaksana berjalan dengan lancar.

4. Karakteristik Antar Badan Pelaksana

Pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terakibat dalam pengimplementasi kebijakan. Hal ini penting karena, kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan, Dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak jalanan peneliti menarik kesimpulan bahwa organisasi formal atau pemerintah daerah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Namun untuk organisasi informal atau diluar pemerintah harus melibatkan lebih banyak lagi dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan ini seperti Komunitas Penyanyi Jalanan (KPJ) mempunyai program sekolah jalanan pun sudah tidak aktif dapat dikatakan bahwa sekolah jalanan tidak berjalan dengan optimal.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan, dari lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kota Serang secara umum memang belum kondusif.

bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Serang terkait dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak jalanan masih belum kondusif khususnya terkait dengan lingkungan ekonomi dan sosial. Karna kondisi sosial masyarakat dilingkungan sasaran kebijakan masih terbilang terlalu masing-masing kurang peduli untuk mencegah para anak jalanan kembali kejalanan, kondisi sosial ini menjadi salah satu faktornya sulit mengatasi jumlah anak jalanan di Kota Serang khususnya karna kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Adapun dukungan dari elit politik hal ini dapat dilihat dari program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Serang akan tetapi Satuan Polisi Pamong Peraja, Pekerja

Sosial Anak (PSA) Kota Serang ikut serta dalam program pembinaan anak jalanan ini.

6. Sikap Para Pelaksana

Dalam sikap para pelaksana terdapat variabel tentang inisiatif, yang dimaksud dengan inisiatif adalah inisiatif pada para pelaksana dalam mencari lokasi untuk anak jalanan seperti rumah singgah. Dalam arti inisiatif para pelaksana yang terjun langsung kelapangan tempat beraktivitasnya anak jalanan di Kota Serang. Pembangunan rumah singgah yang berada di Sempu Cipayung Kota Serang dirasa masih kurang tepat karna rumah singgah yang bukan milik pribadi melainkan masih menyewa. Sangat disarankan untuk pemerintah atau pembuat kebijakan harus lebih serius lagi untuk menanggapi rumah singgah untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesajhteraan Sosial) termasuk anak jalanan agar dapat menjangkau aktivitas anak jalanan, sehingga rumah singgah dapat digunakan dengan fungsinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan bahwa program pembinaan anak jalanan di Kota Serang peneliti memaparkan kesimpulan berdasarkan teori yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini dari Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, dinilai masih belum cukup realistis diterapkan di Kota Serang karna sampai saat ini masih menggunakan Perda Kota Serang Nomer 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sehingga belum adanya landasan hukum sementara yang terkait dengan program pembinaan anak jalanan.
2. Sumber Daya, terdiri dari sumber daya manusia, anggaran/finansial, sarana dan prasarana, dan waktu. Dari segi sumber daya manusia yang terdiri dari Dinas Sosial Kota Serang, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Serang, PSA (Pekerja Sosial Anak) Kota Serang, KPJ (Komunitas Penyanyi Jalanan), Anak Jalanan dan Keluarga Anak

Jalanan. Terkait dengan sumber daya anggaran/finansial yang dimiliki oleh Dinas Sosial sangat minim dan terbatasnya anggaran, secara tak langsung berimbas pada pola pembinaan mengenai rehabilitas yang tidak berjalan secara maksimal. Pada sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang belum memiliki panti khusus dan rumah singgah pun masih menyewa belum milik pribadi. Terakhir sumber daya waktu dalam pelaksanaan kebijakan ini belum memaksimalkan waktu yang ada untuk pelaksanaan program pembinaan anak jalanan.

3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana, yang terlibat dalam pelaksanaan melakukan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang dengan Satpol PP Kota Serang dan PSA Kota Serang dalam komunikasi yang dilakukan secara langsung baik melalui pertemuan tatap muka, komunikasi tersebut dilakukan secara berkala dan berjalan dengan baik.
4. Karakteristik Antar Badan Pelaksana, organisasi formal atau pemerintah daerah sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Dinas Sosial Kota Serang, untuk saat ini tidak melibatkan organisasi informal dalam mensukseskan program pembinaan anak jalanan di Kota Serang dikarnakan dinas sosial sudah menerapkan program pembinaan anak jalanan yang sudah terstruktur dalam pelaksanaannya.
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, Belum kondusif terkait dengan lingkungan ekonomi dan sosial karna kondisi sosial masyarakat dilingkungan masih terbelah terlalu masing-masing dan kurang peduli untuk mencegah anak jalanan agar tidak kembali kejalan. selain itu kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kota Serang.

6. Sikap Para Pelaksana, dalam hal ini pelaksana kebijakan program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh para pelaksana sudah inisiatif, dalam hal ini pelaksana langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi di sekitar wilayah tempat beraktivitas anak jalanan yang ada di Kota Serang. Inisiatif ini, meliputi mendatangi tempat-tempat yang disinggahi anak jalanan, mengakses anak jalanan dan menyediakan tempat untuk digunakan melakukan pembinaan keterampilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, pemerintah Kota Serang harus lebih memfokuskan lagi kebijakan yang sudah ada agar terfokus kepada anak jalanan dan sasaran kebijakannya tepat sasaran.
2. Sumber Daya, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Serang harus mempertimbangkan kembali keberadaan dari rumah singgah karena saat ini rumah singgah yang tersedia tidak digunakan secara maksimal.
3. Komunikasi Para Pelaksana, harus dilakukannya monitoring secara berkala oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam upaya mengimplementasikan kebijakan anak jalanan di Kota Serang agar kebijakan berjalan dengan optimal.
4. Karakteristik Antar Badan Pelaksana, Dinas Sosial Kota Serang sebagai pembuat dan pengatur kebijakan program pembinaan anak jalanan harus lebih melibatkan pihak eksternal/swasta dalam mensukseskan program pembinaan anak jalanan di Kota Serang.
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak-anak muda yang akan menikah untuk mempelajari ilmu parenting agar dikemudian hari anak-anak yang dilahirkan dapat memiliki kehidupan yang layak dan tidak menjadi anak jalanan.
6. Sikap Para Pelaksana, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Serang dalam mengupayakan anak jalanan untuk pelatihannya dilakukan secara berkala agar anak jalanan dapat meningkatkan skill dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekeraan Terhadap Anak Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Bandung: Sosial Nuansa
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabet
- Ketaren. Nurlela. 2009. *Asas-asas Manajemen*. Medan: Usu Pres
- Mazmaniah. 1983. *Implementation and Public Policy*. Jakarta: Raja Grafindo Persadi
- Mangunhardjana, A. 1986. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Jakarta: Kanisus
- Poerwadarmita, 1984. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soedjar, A. 2004. *Penelitian Profil Anak Jalanan DKI Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial*. Jakarta: Dapertemen Sosial
- Subarsono, AG. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet
- Siagian, Matias, dan Suriadi, Agus. 2012. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perpektif Pekerjaan Sosial*. Medan: Fisip USU Press
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta

Dokumen :

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang.

Sumber Lain :

Agung Suprojo dan Nanang Bagus. *Peran dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2 No. 1. 2015

Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri. *Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang*. Ilmu Administrasi Negara Universitas Serang Raya Jurnal Natapraja Vol. 7 No. 2 Tahun 2019

Daniel Sulistiyarini. *Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Holidi Kelurahan Tanjung Kecamatan Pontianak Utara*. Program Sosiologi FKIP Untan. Jurnal Vol 2 No. 12. 2013

Lismiani. *Upaya Dinas Sosial Dalam Membrikan Pelayanan Anak Jalanan Melalui Pembinaan Ketrampilan*. Jurnal 1 No. 1. 2020

Syahrul Mariatul Kibityah. *Probelmatika Pendidikan Anak Jalanan*. Jurnal Basicedu Vol. 4 No. 4: Univeristas Muhammadiyah Kupang. 2020

Titi Stiawati. *Problemmatika dan Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang Provinsi Banten*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurnal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS). 2017